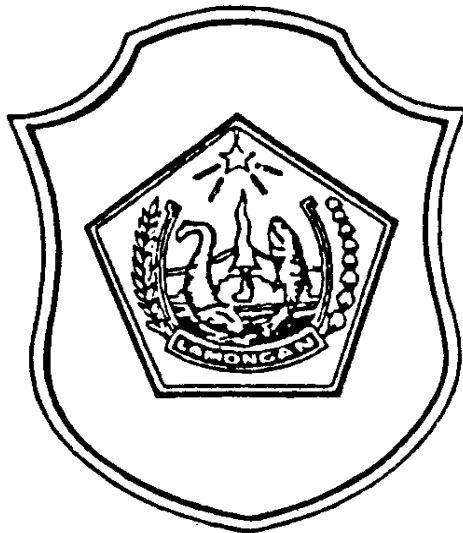


# **REVIU RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017**

## **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH**

Jl. Basuki Rahmad No. 2 ☎ (0322) 321010  
E-Mail: [bpkad@lamongan.go.id](mailto:bpkad@lamongan.go.id), Web site : [www.lamongan.go.id](http://www.lamongan.go.id)

LAMONGAN



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2016**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 merupakan pelaksanaan RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2017 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 disusun berdasarkan analisa bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu suatu pemerintahan yang ditata dan dilaksanakan dengan didasarkan pada tiga pilar utama yaitu : prinsip akuntabilitas, transparansi, demokrasi dan partisipasi.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah

daerah diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan RKP Daerah sebagai rencana tahunan. RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja SKPD setiap tahun anggaran yang merupakan bahan utama Musrenbang RKP Daerah yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 disusun melalui perencanaan yang bersifat *bottom-up*. Bidang-bidang di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas masing-masing kegiatan tersebut. Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program dan kegiatan prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam bidang pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah yang dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun yaitu selama Tahun 2017.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 7 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016;
- 14 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
- 15 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

- a. Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :
- 1 Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan peningkatan pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah;
  - 2 Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan asset/barang daerah.
- b. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan adalah :
- 1 Menjabarkan RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan Tahun 2017;
  - 2 Menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan seluruh kegiatan pada Tahun 2017;
  - 3 Menjadi acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2017 dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renja SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang;
  - 1.2 Landasan Hukum;
  - 1.3 Maksud dan Tujuan;
  - 1.4 Sistematika Penulisan.
- Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD;
  - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ;
  - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
  - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;
  - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- Bab III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
  - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD;
  - 3.3 Program dan Kegiatan.
- Bab IV : PENUTUP

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD

Capaian kinerja pelayanan dan anggaran selama tahun 2016 relatif baik dibandingkan pada tahun 2015, akan tetapi capaian kinerja pelayanan dan anggaran untuk tahun 2016 belum selesai karena belum berakhirnya tahun anggaran.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2015 dilaksanakan untuk mengetahui dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dinas/instansi yang bersangkutan sesuai dengan Rencana Strategis (Rensta) Tahun 2010 – 2015 dan Rencana Kinerja Tahun 2015 dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Secara garis besar pencapaian masing-masing indikator sasaran untuk Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Indikator Sasaran	Target Renstra 2015	Realisasi Renstra 2015
1	2	3	4
1.	Kecepatan dalam meneliti RKA dan DPA	65 SKPD	65 SKPD
2.	Ketepatan penerbitan SPD	65 SKPD	65 SKPD
3.	Peningkatan penggunaan standar analisis Belanja (SAB) dalam penyusunan APBD	64 SKPD	64 SKPD
4.	SP2D terbit tepat waktu	65 SKPD	65 SKPD
5.	Laporan keuangan SKPD dan SKPKD disusun tepat waktu	65 SKPD	65 SKPD

1	2	3	4
6.	Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	65 SKPD	65 SKPD
7.	Tertib administrasi barang daerah	54 SKPD (93,55 %)	58 SKPD (95,08 %)
8.	% Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana	100 %	100 %
9.	% Pegawai yang mengikuti pembinaan keuangan dan barang daerah	100 %	100 %

Dari tabel tersebut diatas terdapat indikator sasaran yang prosentasenya mengalami kenaikan dari target yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

1 Tertib administrasi barang daerah

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 untuk menilai tertib administrasi barang daerah adalah sejumlah 54 SKPD (93,55 %). Target ini lebih rendah dari realisasi tahun 2015 yaitu sejumlah 58 SKPD (95,08 %). Peningkatan ini disebabkan karena penyimpan barang dan pengurus barang dalam menyampaikan laporan barang daerah (RKBU/RKPBU, RTBU/RTPBU, laporan pengadaan, laporan mutasi dan laporan pemeliharaan) tepat waktu sehingga tertib administrasi barang daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Sasaran-sasaran tersebut diatas selaras antara program yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dengan Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 (sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015, sehingga dapat diketahui capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :



Program RPJMD 2010-2015	Program Permendagri Nomor 13 Tahun 2006	% Indikator Sasaran
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</li> <li>• Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> <li>• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>• Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>• Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD di Susun Tepat Waktu</li> <li>• Tertib Administrasi Barang Daerah</li> </ul>

Evaluasi ini dapat dilihat dari capaian kinerja pada tahun 2010-2015 berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2010-2015 dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :











## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah**

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan.

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan **mempunyai tugas** :

**“ Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah“**

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan, mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan terdapat susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Anggaran;
4. Bidang Perbendaharaan;
5. Bidang Akuntansi dan Asset;

6. Unit Pelaksana Teknis Badan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selain memiliki personil dengan latar belakang pendidikan dan ketrampilan sebagaimana telah diuraikan diatas, juga didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kegiatan organisasi.

Untuk melaksanakan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam rangka proses pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer sehingga tertib administrasi pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Analisis kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat dari capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tahun 2010-2015 dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 sebagai berikut :





### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah**

Dalam mekanisme manajemen penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Lamongan, organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai posisi strategis.

Hal ini dikarenakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia yang terampil dan sarana prasarana yang memadai. Adapun isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang diharapkan dapat tercapai yaitu :

- 1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan/pembinaan;
- 2 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung melalui pemanfaatan, penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana yang ada;
- 3 Meningkatkan pengawasan aset-aset milik daerah dalam rangka peningkatan tertib administrasi barang daerah;
- 4 Peningkatan penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan barang daerah.

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja)

Tahun 2017 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan.

Program dan kegiatan Tahun 2017 yang telah diusulkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan merupakan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2017 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2017.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan yang terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan dan dibutuhkan untuk meningkatkan tertib administrasi keuangan dan asset/barang daerah adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
  - 1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
  - 2 Pengadaan peralatan gedung kantor;
  - 3 Pengadaan meubelair;

- 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor;
  - 5 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
- b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
- 1 Pendidikan dan pelatihan formal.
- d. Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah :
1. Penyusunan analisa standar belanja;
  2. Penyusunan standar satuan harga;
  3. Penyusunan Raperda tentang APBD TA. 2018;
  4. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD TA. 2018;
  5. Penyusunan Raperda tentang perubahan APBD TA. 2017;
  6. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD TA. 2017;
  7. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD;
  8. Verifikasi RKA dan DPA APBD;
  9. Verifikasi RKA dan DPPA Perubahan APBD;
  10. Dampingan input RKA, DPA dan DPPA;
  11. Koordinasi dan penyampaian informasi keuangan Daerah tentang APBD;
  12. Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD;
  13. Sosialisasi kebijakan penganggaran keuangan Daerah;
- e. Program Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi Keuangan Daerah :
1. Evaluasi administrasi perbendaharaan;
  2. Penyusunan anggaran kas;
  3. Penyusunan surat penyediaan dana (SPD)
  4. Peningkatan pelayanan pencairan belanja SKPD;
  5. Monitoring dan evaluasi laporan keuangan BUD;
  6. Dampingan implementasi gaji;
  7. Penyusunan laporan realisasi dana alokasi khusus;
  8. Dampingan implementasi SPP, SPM dan SP2D;

9. Sosialisasi dan pemeliharaan penerapan sistem aplikasi gaji skala nasional;
  10. Penatausahaan laporan keuangan BUD;
  11. Sistem informasi pengelolaan kas SKPD dan PPKD;
  12. Optimalisasi fungsi sistem aplikasi perbendaharaan BUD;
  13. Fasilitasi penerimaan dan laporan konfirmasi dana transfer;
  14. Update aplikasi perbendaharaan;
- f. Program Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah :
1. Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2016;
  2. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2016;
  3. Dampingan implementasi sistem akuntansi Pemda Kab.Lamongan Tahun 2017;
  4. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran konsolidasi;
  5. Monitoring pelaksanaan penatausahaan keuangan pada SKPD;
  6. Penyusunan laporan informasi keuangan daerah dan agent sistem informasi keuangan daerah (SIKD);
  7. Penyusunan laporan keuangan tribulanan konsolidasi;
- g. Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah :
1. Peningkatan manajemen aset/barang daerah;
  2. Dampingan implementasi sistem administrasi barang daerah;
  3. Peningkatan pemanfaatan barang daerah;
  4. Penyusunan laporan mutasi barang dan laporan pengadaan;
  5. Pengamanan aset tanah milik Pemerintah Daerah;
  6. Monitoring dan evaluasi aset/barang daerah;
  7. Review RKBU dan RTBU.

Usulan program dan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan, adapun untuk lebih jelasnya rincian program dan kegiatan Tahun 2017 sebagaimana tabel terlampir :



















## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Visi Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah :

**“ TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA  
DAN BERDAYA SAING”**

Untuk mewujudkan visi diatas, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan **Misi** sebagai berikut :

**“ Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan  
Publik “**

Sedangkan untuk mencapai visi dan misi tersebut diatas, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

##### **A. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Adapun **tujuan** yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan dalam merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut : **“ Meningkatkan**

***Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Asset secara Tertib , Akuntabel dan Transparan ”.***

**B. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun **Sasaran** yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan;
- b. Meningkatnya tertib penatausahaan aset daerah..

**3.3 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah.

Untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya dukungan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan telah menetapkan 9 (enam) program yang diaplikasikan ke dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :













## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2017, Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2017 ini dapat disusun.

Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun ini merupakan salah satu bentuk implementasi RKPD dan sebagai alat pengendalian dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tentunya memerlukan kajian analisa secara menyeluruh antara kemampuan Sumber Daya Manusia dengan faktor-faktor sumber daya lainnya guna untuk tercapainya tujuan. Rencana Kerja (Renja) ini juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan.

Fungsi lain dari disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini adalah untuk mengevaluasi kinerja dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, sampai sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Selain itu juga sebagai bahan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Pemerintah Kabupaten Lamongan secara simultan harus segera memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana dalam mendukung terlaksananya peningkatan pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah.

Beberapa langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1 Melakukan pembenahan/peningkatan server untuk program SAKTI yang berbasis Cloud dan Web;
- 2 Melakukan penataan aset-aset daerah agar tercipta tertib administrasi barang daerah;
- 3 Melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang dan meningkatkan kinerja aparatur;
- 4 Mengembangkan potensi SDM secara berkesinambungan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 disamping itu juga Renja Tahun 2017 digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran bagi seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan. Penyusunan Renja ini diharapkan mampu memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Lamongan,            Oktober 2016

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN

**Drs. HERY PRANOTO**

Pembina Utama Muda

Nip. 19620805 198903 1 001

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Reviu Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2017 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan dengan baik.

Reviu Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 ini sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kewenangan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan visi, misi dan tujuan organisasi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Reviu Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan dimasa yang akan datang.

Akhirnya penyusunan Reviu Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 ini dapat diselesaikan dan semoga mendapatkan petunjuk serta bimbingan Allah SWT sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya serta dapat meningkatkan prestasi kerja.

Lamongan, Oktober 2016

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN

**Drs. HERY PRANOTO**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620805 198903 1 010

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB. I    PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB. II   EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ...	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.....	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.....	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .	18
BAB. III   TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	29
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	29
3.3 Program dan Kegiatan .....	30
BAB. IV   PENUTUP .....	36





**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2017**

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2018				
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)			
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10			
<b>4</b>	<b>2</b>				<b>13.753.667.000</b>				<b>14.441.350.350</b>			
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>Program Pelayanan Adm Perkantoran</b>					<b>1.571.815.350</b>			
4	2	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat yang terselesaikan	Kab. Lamongan	1.812 materai, 192 amplop dan 24 surat	7.500.000	APBD	-	1.812 materai, 192 amplop dan 24 surat	7.875.000
4	2	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapainya sarana komunikasi yang lancar	Kab. Lamongan	12 bulan	517.800.000	APBD	-	12 bulan	543.690.000
4	2	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang beroperasi dengan baik	Kab. Lamongan	8 unit roda 4 dan 19 unit roda 2	17.000.000	APBD	-	8 unit roda 4 dan 19 unit roda 2	17.850.000
4	2	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	Kab. Lamongan	4 orang	33.800.000	APBD	-	4 orang	35.490.000
4	2	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	Kab. Lamongan	81 jenis ATK dan 1 jenis cek	130.000.000	APBD	-	81 jenis ATK dan 1 jenis cek	136.500.000
4	2	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	Kab. Lamongan	21 cetakan dan 20 jenis foto copy	110.000.000	APBD	-	21 cetakan dan 20 jenis foto copy	115.500.000
4	2	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	Kab. Lamongan	22 jenis alat listrik	33.000.000	APBD	-	22 jenis alat listrik	34.650.000
4	2	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan	Kab. Lamongan	1 gedung BPKAD	45.000.000	APBD	-	1 gedung BPKAD	47.250.000
4	2	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan dan dan ucapan iklan yang dibutuhkan	Kab. Lamongan	4 jenis surat kabar dan 21 ucapan iklan	22.500.000	APBD	-	4 jenis surat kabar dan 21 ucapan iklan	23.625.000
4	2	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman rapat dan tamu yang dibutuhkan	Kab. Lamongan	12 bulan	75.000.000	APBD	-	12 bulan	78.750.000
4	2	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Lamongan	10 laporan	170.000.000	APBD	-	10 laporan	178.500.000
4	2	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan	Jumlah tenaga administrasi/ teknis kegiatan dan tenaga pengamanan	Kab. Lamongan	25 orang	235.367.000	APBD	-	25 orang	247.135.350
4	2	1	46	Dampingan Implementasi Sistem Aplikasi Kearsipan	Update sistem aplikasi kearsipan yang dilaksanakan	Kab. Lamongan	1 kali update	100.000.000	APBD	-	1 kali update	105.000.000
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>6.920.200.000</b>				<b>7.266.210.000</b>

1				2	4	3	5	6	7	8	9	10
4	2	2	4	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan	Kab. Lamongan	16 unit roda 4 dan 60 unit roda 2	5.890.000.000	APBD	-	16 unit roda 4 dan 60 unit roda 2	6.184.500.000
4	2	2	8	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibutuhkan	Kab. Lamongan	36 unit/bh/psg	377.200.000	APBD	-	36 unit/bh/psg	396.060.000
4	2	2	9	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair yang dibutuhkan	Kab. Lamongan	22 unit/bh	40.000.000	APBD	-	22 unit/bh	42.000.000
4	2	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/ Kantor	Prosentase gedung yang baik	Kab. Lamongan	1 gedung	150.000.000	APBD	-	1 gedung	157.500.000
4	2	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara dengan baik	Kab. Lamongan	1 unit roda 4	43.000.000	APBD	-	1 unit roda 4	45.150.000
4	2	2	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dengan baik	Kab. Lamongan	6 unit roda 4 dan 16 unit roda 2	150.000.000	APBD	-	6 unit roda 4 dan 16 unit roda 2	157.500.000
4	2	2	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara dengan baik	Kab. Lamongan	8 buah	34.000.000	APBD	-	8 buah	35.700.000
4	2	2	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dengan baik	Kab. Lamongan	52 unit komputer, 46 printer & 15 laptop	36.000.000	APBD	-	52 unit komputer, 46 printer & 15 laptop	37.800.000
4	2	2	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Prosentase gedung/asset Pemda dalam kondisi baik	Kab. Lamongan	1 gedung/asset Pemda	200.000.000	APBD	-	1 gedung/asset Pemda	210.000.000
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				<b>45.000.000</b>				<b>47.250.000</b>
4	2	3	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan	Kab. Lamongan	150 potong	45.000.000	APBD	-	150 potong	47.250.000
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>35.000.000</b>				<b>36.750.000</b>
4	2	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pelatihan dan bimbingan teknis yang dikirim	Kab. Lamongan	8 orang	35.000.000	APBD	-	8 orang	36.750.000
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>				<b>275.000.000</b>				<b>288.750.000</b>
4	2	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang diselesaikan	Kab. Lamongan	3 dokumen	15.000.000	APBD	-	3 dokumen	15.750.000
4	2	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan semesteran yang diselesaikan	Kab. Lamongan	1 dokumen	15.000.000	APBD	-	1 dokumen	15.750.000
4	2	6	4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang diselesaikan	Kab. Lamongan	1 dokumen	15.000.000	APBD	-	1 dokumen	15.750.000
4	2	6	6	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi yang diselesaikan	Kab. Lamongan	3 dokumen	30.000.000	APBD	-	3 dokumen	31.500.000
4	2	6	8	Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi laporan keuangan SKPD yg diselesaikan	Kab. Lamongan	1 dokumen	100.000.000	APBD	-	1 dokumen	105.000.000

1				2	4	3	5	6	7	8	9	10
4	2	6	11	Fasilitasi Penyelenggaraan PPKD	Jumlah bantuan yang disalurkan/ dicairkan tepat waktu dan tepat	Kab.Lamongan	8 jenis bantuan	100.000.000	APBD	-	8 jenis bantuan	105.000.000
4	2	20		<b>Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah</b>				<b>1.994.500.000</b>				<b>2.094.225.000</b>
4	2	20	1	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Jumlah dokumen analisa standar belanja tahun 2018 yang disusun	Kab.Lamongan	1 dokumen	135.000.000	APBD	-	1 dokumen	141.750.000
4	2	20	2	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah dokumen standar satuan harga tahun 2018 yang disusun	Kab.Lamongan	1 dokumen	160.000.000	APBD	-	1 dokumen	168.000.000
4	2	20	6	Penyusunan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018	Jumlah dokumen Raperda tentang APBD TA. 2018 yang disusun	Kab.Lamongan	1 dokumen	230.000.000	APBD	-	1 dokumen	241.500.000
4	2	20	7	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018	Jumlah dokumen rancangan per- KDH tentang penjabaran APBD TA. 2018 yang disusun	Kab.Lamongan	1 dokumen	260.000.000	APBD	-	1 dokumen	273.000.000
4	2	20	8	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017	Jumlah dokumen Raperda tentang perubahan APBD TA. 2017 yang disusun	Kab.Lamongan	1 dokumen	260.000.000	APBD	-	1 dokumen	273.000.000
4	2	20	9	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017	Jumlah dokumen rancangan per- KDH tentang penjabaran perubahan APBD TA. 2017 yang disusun	Kab.Lamongan	1 dokumen	240.000.000	APBD	-	1 dokumen	252.000.000
4	2	20	34	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen rancangan perubahan peraturan KDH tahun 2017 yang disusun	Kab.Lamongan	1 dokumen	87.000.000	APBD	-	1 dokumen	91.350.000
4	2	20	36	Verifikasi RKA dan DPA APBD	Jumlah dokumen RKA dan DPA yang selaras dengan dokumen APBD	Kab.Lamongan	75 dokumen SKPD/PPKD	150.000.000	APBD	-	75 dokumen SKPD/PPKD	157.500.000
4	2	20	38	Verifikasi RKA dan DPPA Perubahan APBD	Jumlah dokumen RKA dan DPPA yang selaras dengan dokumen APBD	Kab.Lamongan	75 dokumen SKPD/PPKD	140.000.000	APBD	-	75 dokumen SKPD/PPKD	147.000.000
4	2	20	55	Dampingan Input RKA, DPA dan DPPA	Database dokumen RKA, DPA dan DPPA yang tersedia	Kab.Lamongan	75 SKPD/PPKD	145.000.000	APBD	-	75 SKPD/PPKD	152.250.000
4	2	20	88	Koordinasi dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah tentang APBD	Update sistem informasi keuangan daerah yang dilaksanakan	Kab.Lamongan	2 kali update	50.000.000	APBD	-	2 kali update	52.500.000
4	2	20	90	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan APBD yang disusun	Kab.Lamongan	1 dokumen	70.000.000	APBD	-	1 dokumen	73.500.000
4	2	20	91	Sosialisasi Kebijakan Penganggaran Keuangan Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sistem penganggaran keuangan daerah bagi SKPD se Kab. Lamongan	Kab.Lamongan	90 peserta	67.500.000	APBD	-	90 peserta	70.875.000

1				2	4	3	5	6	7	8	9	10
4	2	21		<b>Program Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi Keuangan Daerah</b>				<b>1.142.000.000</b>				<b>1.199.100.000</b>
4	2	21	25	Evaluasi Administrasi Perbendaharaan	Jumlah verifikasi uang persediaan (UP) SKPD yang dilaksanakan dan penyusunan SK Bupati tentang pengguna anggaran (PA) dan bendahara terkait penatausahaan keuangan yang diterbitkan	Kab.Lamongan	64 SKPD	90.000.000	APBD	-	64 SKPD	94.500.000
4	2	21	26	Penyusunan Anggaran Kas	Buku Peraturan Bupati tentang anggaran kas yang disusun	Kab.Lamongan	3 kali penyusunan Perbup	75.000.000	APBD	-	3 kali penyusunan Perbup	78.750.000
4	2	21	27	Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD)	Jumlah dokumen surat penyediaan dana (SPD) yang tersedia	Kab.Lamongan	260 dokumen SPD	75.000.000	APBD	-	260 dokumen SPD	78.750.000
4	2	21	28	Peningkatan Pelayanan Pencairan Belanja SKPD	Penerbitan SP2D BL secara tepat waktu	Kab.Lamongan	64 SKPD	60.000.000	APBD	-	64 SKPD	63.000.000
4	2	21	29	Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan BUD	Jumlah dokumen rekonsiliasi kas dan bank yang disusun	Kab.Lamongan	288 laporan rekonsiliasi	142.000.000	APBD	-	288 laporan rekonsiliasi	149.100.000
4	2	21	31	Dampingan Implementasi Gaji	Penerbitan SP2D gaji secara tepat waktu	Kab.Lamongan	64 SKPD	50.000.000	APBD	-	64 SKPD	52.500.000
4	2	21	39	Penyusunan Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus	Jumlah laporan realisasi penyerapan DAK yang disusun	Kab.Lamongan	4 laporan DAK	80.000.000	APBD	-	4 laporan DAK	84.000.000
4	2	21	42	Dampingan Implementasi SPP, SPM dan SP2D	Mengevaluasi/monitoring input SPP, SPM dan SP2D yang dilaksanakan	Kab.Lamongan	64 SKPD	110.000.000	APBD	-	64 SKPD	115.500.000
4	2	21	57	Sosialisasi dan Pemeliharaan Penerapan Sistem Aplikasi Gaji Skala Nasional	Sosialisasi sistem aplikasi gaji PNS se SKPD se Kab.Lamongan dan rekonsiliasi data gaji PNS dengan PT. Taspen, BPJS, KPPN, dan Bapertarum yang dilaksanakan	Kab.Lamongan	64 SKPD	75.000.000	APBD	-	64 SKPD	78.750.000
4	2	21	63	Penatausahaan Laporan Keuangan BUD	Jumlah laporan posisi kas yang disusun	Kab.Lamongan	288 laporan posisi kas	75.000.000	APBD	-	288 laporan posisi kas	78.750.000
4	2	21	74	Sistem Informasi Pengelolaan Kas SKPD dan PPKD	Jumlah aplikasi perencanaan kas yang di persiapkan	Kab.Lamongan	1 dampingan aplikasi	80.000.000	APBD	-	1 dampingan aplikasi	84.000.000
4	2	21	91	Optimalisasi Fungsi Sistem Aplikasi Perbendaharaan BUD	Sistem aplikasi perbendaharaan yang tersedia	Kab.Lamongan	1 kali update aplikasi	80.000.000	APBD	-	1 kali update aplikasi	84.000.000
4	2	21	92	Fasilitasi Penerimaan dan Laporan Konfirmasi Dana Transfer	Laporan dana transfer yang tersedia	Kab.Lamongan	4 dokumen LKT dan 1 dokumen LRT	75.000.000	APBD	-	4 dokumen LKT dan 1 dokumen LRT	78.750.000
4	2	21	93	Update Aplikasi Perbendaharaan	Software aplikasi perbendaharaan terkait peraturan perubahan organisasi	Kab.Lamongan	1 aplikasi	75.000.000	APBD	-	1 aplikasi	78.750.000

1				2	4	3	5	6	7	8	9	10
4	2	22		<b>Program Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah</b>				<b>1.075.000.000</b>				<b>1.128.750.000</b>
4	2	22	10	Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016	Jumlah dokumen Perda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 yang disusun	Kab.Lamongan	1 dokumen	260.000.000	APBD	-	1 dokumen	273.000.000
4	2	22	11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016	Jumlah dokumen Per-KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016	Kab.Lamongan	1 dokumen	195.000.000	APBD	-	1 dokumen	204.750.000
4	2	22	20	Dampingan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Dampingan sistem aplikasi akuntansi akrual yang tersedia	Kab.Lamongan	1 sistem aplikasi	140.000.000	APBD	-	1 sistem aplikasi	147.000.000
4	2	22	22	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Konsolidasi	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran konsolidasi yang disusun	Kab.Lamongan	1 dokumen	115.000.000	APBD	-	1 dokumen	120.750.000
4	2	22	41	Monitoring Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan SKPD	Dokumen laporan pertanggungjawaban SKPD yang disusun	Kab.Lamongan	64 SKPD	195.000.000	APBD	-	64 SKPD	204.750.000
4	2	22	66	Penyusunan Laporan Informasi Keuangan Daerah dan Agent Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)	Jumlah dokumen laporan informasi keuangan daerah yang disusun	Kab.Lamongan	22 laporan	100.000.000	APBD	-	22 laporan	105.000.000
4	2	22	75	Penyusunan Laporan Keuangan Tribulanan Konsolidasi	Jumlah dokumen laporan tribulanan konsolidasi tahun 2017	Kab.Lamongan	16 laporan	70.000.000	APBD	-	16 laporan	73.500.000
4	2	23		<b>Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				<b>770.000.000</b>				<b>808.500.000</b>
4	2	23	16	Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah	Sistem aplikasi pengelolaan barang daerah yang tersedia	Kab.Lamongan	1 sistem aplikasi	565.000.000	APBD	-	1 sistem aplikasi	593.250.000
4	2	23	24	Dampingan Implementasi Sistem Administrasi Barang Daerah	Data aset di SKPD yang bertambah dan berkurang maupun yang mutasi	Kab.Lamongan	62 SKPD	-	APBD	-	62 SKPD	-
4	2	23	30	Peningkatan Pemanfaatan Barang Daerah	Penerimaan PAD dari penjualan dan pemanfaatan barang daerah	Kab.Lamongan	40 SKPD	60.000.000	APBD	-	40 SKPD	63.000.000
4	2	23	32	Penyusunan Laporan Mutasi Barang dan Laporan Pengadaan Barang	Laporan mutasi barang dan laporan pengadaan barang SKPD se Kab.Lamongan yang disusun	Kab.Lamongan	62 SKPD	35.000.000	APBD	-	62 SKPD	36.750.000
4	2	23	33	Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah	Jumlah papan tanda kepemilikan tanah dan bangunan yang terpasang	Kab.Lamongan	16 unit	60.000.000	APBD	-	16 unit	63.000.000
				Monitoring dan Evaluasi Asset/ Barang Daerah	Monitoring asset/barang daerah di Kecamatan	Kab.Lamongan	27 Kecamatan	25.000.000	APBD	-	27 Kecamatan	26.250.000
				Review RKBU dan RTBU	Laporan RTUB dan RKBU yang disusun	Kab.Lamongan	62 SKPD	25.000.000	APBD	-	62 SKPD	26.250.000

**TABEL. 2.5.3**  
**Penggabungan Prioritas Masukan Masyarakat dengan Rancangan Renja SKPD**  
**Kabupaten Lamongan**

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Rancangan Renja						Hasil Prioritas Masukan Masyarakat					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>KEUANGAN</b>				<b>13.753.667.000</b>						
	<b>Program Pelayanan Adm Perkantoran</b>				<b>1.496.967.000</b>						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lamongan	Terkirimnya surat yang terselesaikan	1.812 materai, 192 amplop dan 24 surat	7.500.000						
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lamongan	Tercapainya sarana komunikasi yang lancar	12 bulan	517.800.000						
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Lamongan	Kendaraan dinas/operasional yang beroperasi dengan baik	8 unit roda 4 dan 19 unit roda 2	17.000.000						
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Lamongan	Jumlah tenaga kebersihan	4 orang	33.800.000						
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. Lamongan	jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	81 jenis ATK dan 1 jenis cek	130.000.000						
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lamongan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	21 cetakan dan 20 jenis foto copy	110.000.000						
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lamongan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	22 jenis alat listrik	33.000.000						
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lamongan	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan	1 gedung BPKAD	45.000.000						
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lamongan	Bahan bacaan dan dan ucapan iklan yang dibutuhkan	4 jenis surat kabar dan 21 ucapan iklan	22.500.000						
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab. Lamongan	Makanan dan minuman rapat dan tamu yang dibutuhkan	12 bulan	75.000.000						
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10 laporan	170.000.000						
12	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan	Kab. Lamongan	Jumlah tenaga administrasi/ teknis kegiatan dan tenaga pengamanan	25 orang	235.367.000						
13	Dampingan Implementasi Sistem Aplikasi Kearsipan	Kab. Lamongan	Update sistem aplikasi kearsipan yang dilaksanakan	1 kali update	100.000.000						
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>6.920.200.000</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Lamongan	Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan	16 unit roda 4 dan 60 unit roda 2	5.890.000.000						
15	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Lamongan	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibutuhkan	36 unit/bh/psg	377.200.000						
16	Pengadaan Meubelair	Kab. Lamongan	Jumlah meubelair yang dibutuhkan	22 unit/bh	40.000.000						
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/ Kantor	Kab. Lamongan	Prosentase gedung yang baik	1 gedung	150.000.000						
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Kab. Lamongan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara dengan baik	1 unit roda 4	43.000.000						
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Lamongan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara dengan baik	6 unit roda 4 dan 16 unit roda 2	150.000.000						
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor	Kab. Lamongan	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara dengan baik	8 buah	34.000.000						
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor	Kab. Lamongan	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dengan baik	52 unit komputer, 46 printer & 15 laptop	36.000.000						
22	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kab. Lamongan	Prosentase gedung/asset Pemda dalam kondisi baik	1 gedung/asset Pemda	200.000.000						
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				<b>45.000.000</b>						
23	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Kab. Lamongan	Jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan	150 potong	45.000.000						
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>35.000.000</b>						
24	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kab. Lamongan	Jumlah peserta pelatihan dan bimbingan teknis yang dikirim	8 orang	35.000.000						
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>				<b>275.000.000</b>						
25	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lamongan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang diselesaikan	3 dokumen	15.000.000						
26	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kab. Lamongan	Jumlah dokumen laporan semesteran yang diselesaikan	1 dokumen	15.000.000						
27	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Lamongan	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang diselesaikan	1 dokumen	15.000.000						
28	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Kab. Lamongan	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi yang diselesaikan	3 dokumen	30.000.000						
29	Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD	Kab. Lamongan	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi laporan keuangan SKPD yang diselesaikan	1 dokumen	100.000.000						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Fasilitasi Penyelenggaraan PPKD	Kab.Lamongan	Jumlah bantuan yang disalurkan/ dicairkan tepat waktu dan tepat	8 jenis bantuan	100.000.000						
	<b>Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah</b>				<b>1.994.500.000</b>						
31	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Kab.Lamongan	Jumlah dokumen analisa standar belanja tahun 2018 yang disusun	1 dokumen	135.000.000						
32	Penyusunan Standar Satuan Harga	Kab.Lamongan	Jumlah dokumen standar satuan harga tahun 2018 yang disusun	1 dokumen	160.000.000						
33	Penyusunan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018	Kab.Lamongan	Jumlah dokumen Raperda tentang APBD TA. 2018 yang disusun	1 dokumen	230.000.000						
34	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018	Kab.Lamongan	Jumlah dokumen rancangan per- KDH tentang penjabaran APBD TA. 2018 yang disusun	1 dokumen	260.000.000						
35	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017	Kab.Lamongan	Jumlah dokumen Raperda tentang perubahan APBD TA. 2017 yang disusun	1 dokumen	260.000.000						
36	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017	Kab.Lamongan	Jumlah dokumen rancangan per- KDH tentang penjabaran perubahan APBD TA. 2017 yang disusun	1 dokumen	240.000.000						
37	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Kab.Lamongan	Jumlah dokumen rancangan perubahan peraturan KDH tahun 2017 yang disusun	1 dokumen	87.000.000						
38	Verifikasi RKA dan DPA APBD	Kab.Lamongan	Jumlah dokumen RKA dan DPA yang selaras dengan dokumen APBD	75 dokumen SKPD/PPKD	150.000.000						
39	Verifikasi RKA dan DPPA Perubahan APBD	Kab.Lamongan	Jumlah dokumen RKA dan DPPA yang selaras dengan dokumen APBD	75 dokumen SKPD/PPKD	140.000.000						
40	Dampingan Input RKA, DPA dan DPPA	Kab.Lamongan	Database dokumen RKA, DPA dan DPPA yang tersedia	75 SKPD/PPKD	145.000.000						
41	Koordinasi dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah tentang APBD	Kab.Lamongan	Update sistem informasi keuangan daerah yang dilaksanakan	2 kali update	50.000.000						
42	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD	Kab.Lamongan	Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan APBD yang disusun	1 dokumen	70.000.000						
43	Sosialisasi Kebijakan Penganggaran Keuangan Daerah	Kab.Lamongan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sistem penganggaran keuangan daerah bagi SKPD se Kab. Lamongan	90 peserta	67.500.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi Keuangan Daerah</b>				<b>1.142.000.000</b>						
44	Evaluasi Administrasi Perbendaharaan	Kab.Lamongan	Jumlah verifikasi uang persediaan (UP) SKPD yang dilaksanakan dan penyusunan SK Bupati tentang pengguna anggaran (PA) dan bendahara terkait penatausahaan keuangan yang diterbitkan	64 SKPD	90.000.000						
45	Penyusunan Anggaran Kas	Kab.Lamongan	Buku Peraturan Bupati tentang anggaran kas yang disusun	3 kali penyusunan Perbup	75.000.000						
46	Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD)	Kab.Lamongan	Jumlah dokumen surat penyediaan dana (SPD) yang tersedia	260 dokumen SPD	75.000.000						
47	Peningkatan Pelayanan Pencairan Belanja SKPD	Kab.Lamongan	Penerbitan SP2D BL secara tepat waktu	64 SKPD	60.000.000						
48	Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan BUD	Kab.Lamongan	Jumlah dokumen rekonsiliasi kas dan bank yang disusun	288 laporan rekonsiliasi	142.000.000						
49	Dampingan Implementasi Gaji	Kab.Lamongan	Penerbitan SP2D gaji secara tepat waktu	64 SKPD	50.000.000						
50	Penyusunan Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus	Kab.Lamongan	Jumlah laporan realisasi penyerapan DAK yang disusun	4 laporan DAK	80.000.000						
51	Dampingan Implementasi SPP, SPM dan SP2D	Kab.Lamongan	Mengevaluasi/monitoring input SPP, SPM dan SP2D yang dilaksanakan	64 SKPD	110.000.000						
52	Sosialisasi dan Pemeliharaan Penerapan Sistem Aplikasi Gaji Skala Nasional	Kab.Lamongan	Sosialisasi sistem aplikasi gaji PNS se SKPD se Kab.Lamongan dan rekonsiliasi data gaji PNS dengan PT. Taspen, BPJS, KPPN, dan Bapertarum yang dilaksanakan	64 SKPD	75.000.000						
53	Penatausahaan Laporan Keuangan BUD	Kab.Lamongan	Jumlah laporan posisi kas yang disusun	288 laporan posisi kas	75.000.000						
54	Sistem Informasi Pengelolaan Kas SKPD dan PPKD	Kab.Lamongan	Jumlah aplikasi perencanaan kas yang di persiapkan	1 dampingan aplikasi	80.000.000						
55	Optimalisasi Fungsi Sistem Aplikasi Perbendaharaan BUD	Kab.Lamongan	Sistem aplikasi perbendaharaan yang tersedia	1 kali update aplikasi	80.000.000						
56	Fasilitasi Penerimaan dan Laporan Konfirmasi Dana Transfer	Kab.Lamongan	Laporan dana transfer yang tersedia	4 dokumen LKT dan 1 dokumen LRT	75.000.000						
57	Update Aplikasi Perbendaharaan	Kab.Lamongan	Software aplikasi perbendaharaan terkait peraturan perubahan organisasi	1 aplikasi	75.000.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah</b>				<b>1.075.000.000</b>						
58	Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016	Kab.Lamongan	Jumlah dokumen Perda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 yang disusun	1 dokumen	260.000.000						
59	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016	Kab.Lamongan	Jumlah dokumen Per-KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016	1 dokumen	195.000.000						
60	Dampingan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab.Lamongan	Dampingan sistem aplikasi akuntansi akrual yang tersedia	1 sistem aplikasi	140.000.000						
61	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Konsolidasi	Kab.Lamongan	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran konsolidasi yang disusun	1 dokumen	115.000.000						
62	Monitoring Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan SKPD	Kab.Lamongan	Dokumen laporan pertanggungjawaban SKPD yang disusun	64 SKPD	195.000.000						
63	Penyusunan Laporan Informasi Keuangan Daerah dan Agent Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)	Kab.Lamongan	Jumlah dokumen laporan informasi keuangan daerah yang disusun	22 laporan	100.000.000						
64	Penyusunan Laporan Keuangan Tribunalan Konsolidasi	Kab.Lamongan	Jumlah dokumen laporan tribunalan konsolidasi tahun 2017	16 laporan	70.000.000						
	<b>Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				<b>770.000.000</b>						
65	Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah	Kab.Lamongan	Sistem aplikasi pengelolaan barang daerah yang tersedia	1 sistem aplikasi	565.000.000						
66	Dampingan Implementasi Sistem Administrasi Barang Daerah	Kab.Lamongan	Data aset di SKPD yang bertambah dan berkurang maupun yang mutasi	62 SKPD	-						
67	Peningkatan Pemanfaatan Barang Daerah	Kab.Lamongan	Penerimaan PAD dari penjualan dan pemanfaatan barang daerah	40 SKPD	60.000.000						
68	Penyusunan Laporan Mutasi Barang dan Laporan Pengadaan Barang	Kab.Lamongan	Laporan mutasi barang dan laporan pengadaan barang SKPD se Kab.Lamongan yang disusun	62 SKPD	35.000.000						
69	Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah	Kab.Lamongan	Jumlah papan tanda kepemilikan tanah dan bangunan yang terpasang	16 unit	60.000.000						
70	Monitoring dan Evaluasi Asset/ Barang Daerah	Kab.Lamongan	Monitoring asset/barang daerah di Kecamatan	27 Kecamatan	25.000.000						
71	Review RKBU dan RTBU	Kab.Lamongan	Laporan RTUB dan RKBU yang disusun	62 SKPD	25.000.000						

**Tabel.T-VI.C.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah**  
**Kabupaten Lamongan**

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2014 (tahun n-2)	Tahun 2015 (tahun n-1)	Tahun 2016 (tahun n)	Tahun 2017 (tahun n + 1)	Tahun 2014 (tahun n-2)	Tahun 2015 (tahun n-1)	Tahun 2016 (tahun n)	Tahun 2017 (tahun n + 1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>											
1	Kecepatan dalam Meneliti RKA dan DPA	-		65 SKPD	65 SKPD	-	-	65 SKPD	65 SKPD	-	-	-
2	Ketepatan Penerbitan SPD	-		65 SKPD	65 SKPD	-	-	65 SKPD	65 SKPD	-	-	-
3	Peningkatan Penggunaan Standar Analisis Belanja (SAB) dalam Penyusunan APBD	-		64 SKPD	64 SKPD	-	-	64 SKPD	64 SKPD	-	-	-
4	SP2D Terbit Tepat Waktu	-		65 SKPD	65 SKPD	-	-	65 SKPD	65 SKPD	-	-	-
5	Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD disusun Tepat Waktu	-		65 SKPD	65 SKPD	-	-	65 SKPD	65 SKPD	-	-	-
6	Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	-		65 SKPD	65 SKPD	-	-	65 SKPD	65 SKPD	-	-	-
7	Tertib Administrasi Barang Daerah	-		52 SKPD (84 %)	54 SKPD (93,55 %)	-	-	58 SKPD (95,08 %)	58 SKPD (95,08 %)	-	-	-
8	% Peningkatan Kuantitas Sarana dan Prasarana	-		100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-
9	% Pegawai yang Mengikuti Pembinaan Keuangan dan Barang Daerah	-		100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-
10	Ketepatan Waktu dalam Pengelolaan Keuangan											
	- Penyampaian rencana kerja anggaran SKPD tepat waktu	-		-	-	83%	87%	-	-	-	85%	
	- Pelaksanaan Belanja	-		-	-	90%	90%	-	-	-	90%	
	- Penetapan Pertanggungjawaban APBD	-		-	-	100%	100%	-	-	-	100%	
11	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	-		-	-	12%	15,82%	-	-	-	14%	
12	Prosentase SKPD yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja	-		-	-	75%	80%	-	-	-	80%	
13	Toleransi Deviasi Penyerapan Keuangan sesuai target	-		-	-	10%	10%	-	-	-	10%	
14	Prosentase SKPD yang memiliki SDM akuntansi dalam pelaksanaan accrual accounting	-		-	-	60%	70%	-	-	-	70%	
15	Prosentase Tanah milik Pemerintah Kabupaten Lamongan yang Bersertifikat	-		-	-	45%	50%	-	-	-	48%	
16	Prosentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang Digunakan dan Dimanfaatkan	-		-	-	72%	75%	-	-	-	73%	
17	Prosentase Data Aset yang Akurat	-		-	-	72%	75%	-	-	-	73%	

**Tabel.T-VI.C.6**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Tahun Berjalan**  
**Kabupaten Lamongan**

Nama SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/ kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014 (tahun n-2)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2015 (tahun lalu/n-1)			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun 2016 berjalan (n)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2016 (tahun berjalan/n)		Catatan		
					Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)			
												6	7
1	20												
1	20	01	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>										
1	20	01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	Tercapainya sarana komunikasi yang lancar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas	Kendaraan dinas/operasional yang beroperasi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya kenyamanan kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (ATK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan	Tersedianya tenaga administrasi/teknis kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	01	20	Penyusunan Sistem Aplikasi Tata Surat Dinas	Terselenggaranya tata surat dinas tepat waktu dan tepat sasaran	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
1	20	02	<b>Program Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Aparatur</b>										
1	20	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemenuhan kekurangan kebutuhan kendaraan dinas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	02	10	Pengadaan Meubelair	Perlengkapan gedung sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	Prosentase gedung yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor	Perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung/Kantor	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	02	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala meubelair	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	
1	20	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Prosentase gedung/asset Pemda Pemda dalam kondisi baik	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>										
1	20	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Pemenuhan pakaian dinas sesuai kebutuhan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										
1	20	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya pengiriman peserta pelatihan dan bimbingan teknis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>										
1	20	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan semesteran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	06	06	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan	Tersusunnya laporan perencanaan dan evaluasi	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	06	08	Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD	Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	17		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>										
1	20	17	01	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Tersedianya buku analisa standar belanja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	17	02	Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersedianya buku standar satuan harga	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	20	17	03	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	
1	20	17	04	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemda Berbasis Akrua	Tersedianya buku Perbup tentang Sisdur akuntansi Pemda berbasis akrua	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	
1	20	17	06	Penyusunan Raperda tentang APBD	Terlaksananya dasar hukum Perda APBD Kab.Lamongan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	17	07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya dasar hukum Peraturan KDH tentang penjabaran APBD Kab.Lamongan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	17	08	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD	Terlaksananya dasar hukum Perubahan Perda APBD Kab.Lmg	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	17	09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya dasar hukum Peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD Kab.Lamongan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	17	10	Penyusunan Rancanga Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	17	11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	17	16	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah	Software SABDA Kab.Lamongan	86%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	17	20	Dampingan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	17	22	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Konsolidasi	Pemantapan pelaksanaan pencatatan keuangan daerah yang berbasis akuntansi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	17	23	Pelatihan Administrasi Pengelolaan Barang Daerah	Peningkatan tertib administrasi pengelolaan barang daerah	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	
1	20	17	24	Dampingan Implementasi Sistem Administrasi Barang Daerah (SABDA)	Data aset yang bertambah dan berkurang maupun yg mutasi	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	17	25	Evaluasi Administrasi Perbendaharaan	Verifikasi uang persediaan (UP) SKPD, penerbitan SK Bupati tentang PA, Bendahara terkait penatausahaan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	17	26	Penyusunan Anggaran Kas	Tersusunnya anggaran kas SKPD dan PPKD di Pemkab.Lmg	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	17	27	Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD)	Tersedianya SPD periode tribulanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	17	28	Peningkatan Pelayanan Pencairan Belanja SKPD	Penerbitan SP2D secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	17	29	Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan BUD	Terlaksananya monev laporan keuangan BUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	20	17	30	Peningkatan Pemanfaatan Barang Daerah	Peningkatan penerimaan PAD dari penjualan dan pemanfaatan barang daerah	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	17	31	Dampingan Implementasi Gaji	Rekonsiliasi data gaji PNS dengan Taspen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	17	32	Penyusunan Laporan Mutasi Barang dan Laporan Pengadaan	Penyusunan laporan mutasi barang dan laporan pengadaan barang se Kab.Lamongan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	17	33	Pengamanan Aset Tanda Milik Pemerintah Daerah	Pengamanan secara fisik tanah & bangunan milik Pemkab.Lamongan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	17	34	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya rancangan perubahan peraturan Kepala Daerah th. 2017	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	17	35	Fasilitasi Penyaluran Dana Bantuan, Hibah, Subsidi dan Pembiayaan	Pencairan/penyaluran dana tepat waktu dan tepat sasaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	17	36	Verifikasi RKA dan DPA APBD	Terciptanya rencana kerja anggaran & dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dgn aturan berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	17	38	Verifikasi RKA dan DPPA Perubahan APBD	Terciptanya rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran sesuai dgn aturan berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	17	39	Penyusunan Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus	Penyediaan laporan realisasi penyerapan DAK Pemkab.Lmg	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	17	41	Monitoring Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan SKPD	Pemantapan penatausahaan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	17	42	Dampingan Implementasi SPP, SPM dan SP2D	Mengevaluasi/monitoring input SPP SPM dan SP2D	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	17	55	Dampingan Input RKA, DPA dan DPPA	Tercapainya pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	17	56	- Fasilitasi & Monitoring Anggaran Bantuan Khusus Infrastruktur dan Ekonomi Produktif	Tercapainya konsolidasi anggaran bantuan khusus infrastruktur dan ekonomi produktif	100%	-	-	-	-	-	-	-	
				- Penataan dan Penyusunan Aplikasi Kearsipan	Terselenggaranya kearsipan yang rapi	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	
1	20	17	57	- Pelatihan Akuntansi bagi SKPD	Mengerti akan standar akuntansi pemerintahan	100%	-	-	-	-	-	-	-	
				- Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua	Mengerti akan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual	100%	-	-	-	-	-	-	-	
				- Sosialisasi dan Pemeliharaan Penerapan Sistem Aplikasi Gaji Skala Nasional	Sosialisasi sistem aplikasi gaji PNS se Kab.Lamongan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	20	17	58	Penyusunan Perubahan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya standart operasional dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
1	20	17	60	Penyusunan Sistem Penatausahaan dan Akuntansi	Peranti lunak aplikasi penatausahaan dan akuntansi	-	100%	-	-	-	-	-	-	-
1	20	17	61	Inventarisasi dan penilaian aset 10 SKPD	Data aset/barang daerah yang akurat	-	100%	-	-	-	-	-	-	-
1	20	17	63	Penatausahaan Laporan Keuangan BUD	Tersedianya laporan posisi kas pada RKUD	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	20	17	65	Penyusunan Modul Penatausahaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	Akurasi dana kapitasi jaminan kesehatan nasional	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-
1	20	17	66	Penyusunan Laporan Informasi Keuangan Daerah dan Agent Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)	Terkirimnya data informasi keuangan daerah tepat waktu	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
1	20	17	67	Dampingan dan Update Aplikasi Perbendaharaan BUD	Update sistem aplikasi perbendaharaan	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
1	20	17	73	Dampingan Penatausahaan Kapitasi	Mengevaluasi/monitoring input dana kapitasi JKN	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
1	20	17	74	Sistem Informasi Pengelolaan Kas SKPD dan PPKD	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan kas pada SKPD dan PPKD	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
1	20	17	75	Penyusunan Laporan Keuangan Tribulanan Konsolidasi	Terpeuhnya laporan keuangan tribulanan konsolidasi	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
1	20	17	76	Dampingan Implementasi Sistem Aplikasi Kearsipan	Peningkatan pengelolaan tata tertib kearsipan	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
1	20	17	88	Koordinasi dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah tentang APBD	Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
1	20	17	90	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD	Tersedianya buku pedoman pelaksanaan APBD	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
1	20	17	91	Penyusunan Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua	Tersedianya buku penyusunan perubahan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
1	20	17	92	Monitoring dan Evaluasi Asset/Barang Daerah	Tersedianya data dan kondisi aset tak bergerak berupa bangunan	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%